

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kemiskinan tetap menjadi problematika di berbagai negara belahan dunia dan sepertinya akan terus menjadi permasalahan yang tidak kunjung usai. Kemiskinan merupakan tantangan pembangunan strategis bagi sebuah negara, dimana kemiskinan sering menjadi penghalang bagi negara-negara dunia yang sedang dalam proses pembangunan. Pada dasarnya, kemiskinan adalah masalah sosial yang mendunia, karena kemiskinan ini telah menjadi perhatian dan masalah dunia meskipun dampak dari kemiskinan disetiap negara berbeda-beda. Apalagi bagi negara berkembang, isu kemiskinan ini merupakan isu penting yang perlu dipahami dan dimengerti bahwa diperlukan penyelesaian secara global terhadap permasalahan dunia ini.

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang dunia, bahwa semenjak kemerdekaan Indonesia terdapat harapan yang besar akan terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur, seperti yang tertuang dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Berbagai program pembangunan yang telah dilakukan sejauh ini selalu berupaya untuk mengentaskan kemiskinan karena memang program pembangunan dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Meskipun telah banyak dilakukan program pengentasan kemiskinan, namun belum banyak

menghasilkan perubahan sehingga masalah kemiskinan terus berlanjut hingga hari ini (Prawoto et al., 2009).

Kemiskinan di Indonesia menjadi permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional karena berhubungan dengan disabilitas akses ekonomi, sosial dan budaya, politik serta partisipasi umum. Masalah kemiskinan lebih luas dari sekedar faktor rendahnya tingkat penghasilan atau konsumsi rata-rata per kapita seseorang berada dibawah standar kesejahteraan. Kemiskinan ini memiliki makna yang lebih dalam karena berhubungan dengan faktor lainnya diluar dari masalah pendapatan misalnya tidak mempunya seseorang untuk mencapai kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan, air bersih dan sanitasi (Nurwati, 2008). Kemiskinan diakibatkan oleh beberapa aspek, salah satunya adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia yang disebabkan oleh diam, bimbang atau gagal untuk berusaha. Tingkat kemiskinan rumah tangga dapat digambarkan dengan struktur pendapatan dan pengeluaran. Pendapatan rendah dapat mengurangi daya beli, sehingga keluarga miskin membuat pilihan tentang bagaimana mereka membelanjakan pendapatannya dan bahkan mungkin terpaksa melepaskan beberapa kebutuhan dasar lainnya untuk memenuhi kebutuhan dasar tertentu (Engkus, 2020).

Terdapat dua alternatif upaya pengentasan kemiskinan yang dapat ditempuh. Pertama, melindungi dan memenuhi kebutuhan keluarga miskin dari segala bidang. Kedua, memberikan pelatihan dan bimbingan agar

masyarakat miskin tersebut memiliki kemampuan untuk mencegah terjadinya pertumbuhan kemiskinan baru (Ferezagia, 2018). Begitupun dengan kemiskinan di Jawa Barat yang menjadi persoalan krusial sehingga dibutuhkan solusi untuk mengentaskan angka kemiskinan yang terus mengalami kenaikan, seperti yang terlampir pada tabel 1.1 dibawah ini.

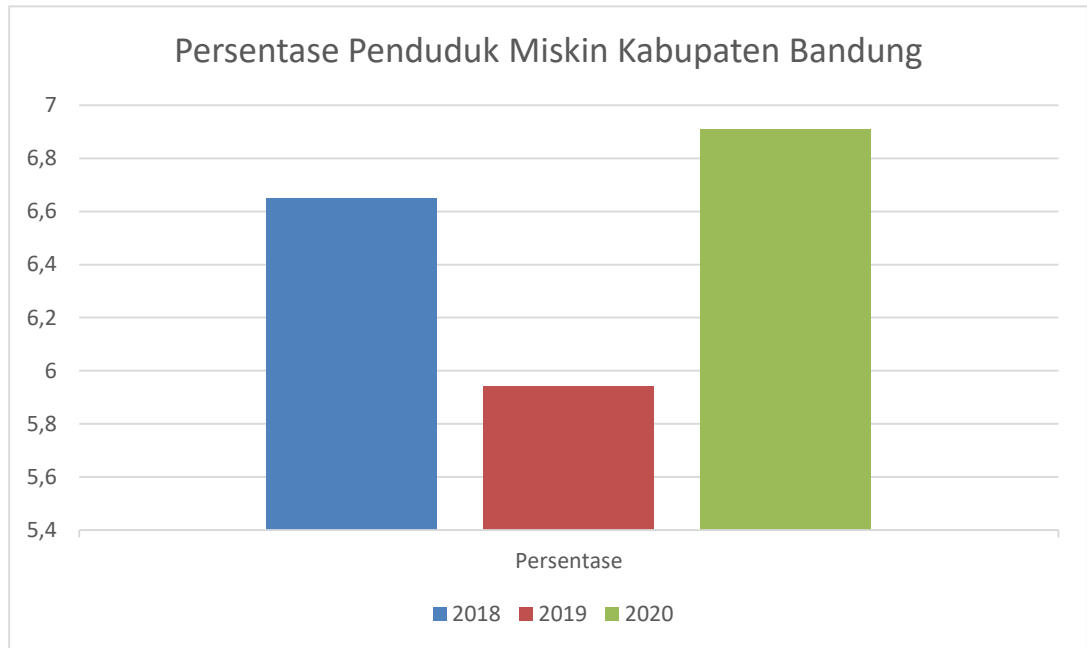
Tabel 1. 1 Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Jawa Barat Tahun 2018-2020

Wilayah Jawa Barat	Persentase Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)					
	2018	%	2019	%	2020	%
Provinsi Jawa Barat	3615.8	7.45	3399.2	6.91	3920.2	7.88

Sumber: BPS Jawa Barat (diolah peneliti), 2022

Hal ini berdasarkan pada data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat yang mengalami kenaikan diantara periode Maret 2018- Maret2020. Pada tahun 2018, tercatat 7,45 persen atau sekitar 3615,8 ribu jiwa penduduk Jabar dengan kategori miskin. Sedangkan pada tahun 2019 sempat terjadi penurunan angka penduduk Jabar dengan kategori miskin menjadi 6,91 persen atau sekitar 3399,2 ribu jiwa. Namun pada tahun 2020, angka kemiskinan kembali naik dengan persentase 7,88 persen penduduk kategori miskin atau berjumlah 3920,2 ribu jiwa. Jumlah penduduk Jabar tahun 2020 dengan kategori miskin ini bahkan menempati posisi lebih meningkat dibanding kenaikan yang terjadi pada tahun 2018. Begitupun dengan Kabupaten Bandung sebagai salah satu kabupaten di Jawa Barat yang juga memiliki peningkatan kemiskinan pada tahun 2020, seperti yang dapat dilihat pada diagram 1.1 di bawah.

Diagram 1. 1 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bandung Tahun 2018-2020



Sumber : BPS Kabupaten Bandung (diolah peneliti), 2022

Berdasarkan data BPS Jawa Barat yang menunjukkan bahwa populasi penduduk miskin per Maret 2018-2020 terus mengalami kenaikan angka yang semula berjumlah 6.65% atau sekitar 246 ribu jiwa menjadi 6.91% atau sekitar 263 ribu jiwa. Meskipun pada tahun 2019, populasi penduduk miskin di Kabupaten Bandung mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya yaitu 2018. Namun di tahun selanjutnya yaitu 2020 terjadi pelonjakan angka kembali yang bahkan lebih besar dari pelojakan yang terjadi di tahun 2018. Pada tahun 2020, tingkat kemiskinan di Kabupaten Bandung ini menempati posisi kedua terbesar setelah Bogor dengan jumlah 263.6 ribu jiwa.

Selama ini regulasi perundang-undangan yang berkaitan upaya penanganan fakir miskin yang ada masih bersifat parsial, maka dari itu Undang Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dijadikan sebagai landasan khusus. Penanganan terhadap fakir miskin merupakan tugas setiap pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat yang sifatnya terencana, terstruktur, dan kontinu baik dalam bentuk kebijakan, program maupun kegiatan yang ditujukan untuk memberdayakan, membimbing, dan membantu memenuhi kebutuhan dasar setiap orang (Presiden RI, 2011). Strategi pengentasan kemiskinan yang selama ini digunakan sifatnya hanya menggunakan pendekatan ekonomi saja, akibatnya program bantuan yang selama ini diberikan belum menghasilkan perubahan yang signifikan terhadap permasalahan kemiskinan yang ada, bahkan malah menimbulkan masalah-masalah baru.

Menurut Ginanjar Kartasasmita (1995) dalam (Suyanto, 2001) pada dasarnya perkembangan ekonomi yang lambat berasal dari terbatasnya kesempatan seseorang untuk kontribusi dalam pembangunan. Hal tersebut merupakan pengaruh dari rendahnya masyarakat miskin yang memiliki aset produktif, seperti halnya modal. Masyarakat miskin umumnya tidak memiliki kelebihan penghasilan untuk disimpan hingga dapat menjadi sebuah modal, karena penghasilan yang didapatkan hanya dapat mencukupi kebutuhan dasar. Terdapat aspek lain yang menyebabkan berbagai program pengentasan kemiskinan berjalan kurang optimal, terdapat faktor lain yang disebabkan oleh kurangnya ruang yang cukup bagi warga miskin untuk

memperluas kesempatan mereka. Seringkali kegiatan pengembangan yang ditujukan demi kesejahteraan masyarakat miskin, mereka malah terjerumus kedalam perangkat program-program yang menciptakan ketergantungan baru dan bahkan menghancurkan potensi inisiatif lokal.

Bagi Chamber (1995) dalam (Margolang, 2018) upaya pengentasan kemiskinan melalui konsep pemberdayaan masyarakat dianggap tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan dasar semata, namun dapat menjadi jalan bagi masyarakat miskin menumbuhkan ekonomi lokal. Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat setempat dalam merencanakan, mengambil keputusan dan mengelola sumber daya yang mereka miliki sehingga pada akhirnya mereka memiliki keberdayaan dan otonomi secara berkelanjutan secara ekonomi, lingkungan dan sosial. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat pada dasarnya erat kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan, yang mensyaratkan pemenuhan kemandirian masyarakat yang berkelanjutan secara ekonomi, lingkungan dan sosial dan selalu dinamis. Pemberdayaan masyarakat menjadi strategi pembangunan yang berupaya mengangkat harkat dan martabat masyarakat yang masih terjebak dalam lingkaran kemiskinan dan keterbelakangan.

Dan salah satu upaya pemberdayaan fakir miskin ini tertuang dalam Permensos RI Nomor 25 Tahun 2015 tentang Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang diprakarsai oleh Kementrian Sosial. Tujuan utama dari program ini tiada lain untuk menghapuskan kemiskinan melewati: 1).

Meningkatnya kemampuan mengelola suatu usaha secara bersama dalam satu kelompok; 2) Meningkatnya penghasilan; 3) Mengembangkan usaha; dan 4) Meningkatnya rasa saling memiliki baik antara sesama anggota maupun dengan masyarakat yang lain (Roebyantho, 2013).

Maksud dikeluarkannya program ini tidak lain adalah keberlanjutan masyarakat pada khususnya bagi masyarakat yang tidak dapat memperoleh kesempatan untuk meningkatkan perekonomian sehingga memperoleh pekerjaan untuk memenuhi kebutuhannya sehingga masyarakat dapat sejahtera, memajukan perekonomian nasional pada lapisan masyarakat bawah, mengembangkan kewirausahaan, mengembangkan sistem jaringan usaha, meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat. masyarakat dan meningkatkan pendapatan (Hidayat et al., 2018).

Sebagai daerah yang turut serta melakukan upaya pemberdayaan fakir miskin, Kabupaten Bandung telah melaksanakan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) ini selama 5 tahun terakhir. Sebagai daerah yang termasuk memiliki kepadatan penduduk yang lebih dibanding daerah lainnya, sehingga kondisi tersebut menjadikan angka kemiskinan di Kabupaten tinggi. Kabupaten Bandung adalah sebuah daerah dengan luas 1.762,4 Km² yang meliputi 31 Kecamatan dan 280 Desa/Kelurahan yang terdiri dari 40 Kecamatan dan 435 Desa/Kelurahan pastinya memiliki beragam permasalahan sosial, salah satu permasalahan sosial yang ada menyangkut masalah kemiskinan yang erat kaitannya dengan lambannya

pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bandung, tingginya harga kebutuhan pokok serta rendahnya daya beli masyarakat.

Adapun hasil dari pelaksanaan Crogram KUBE di Kabupaten Bandung selama ini, peneliti paparkan melalui data dibawah ini:

Gambar 1. 1 Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Sosial dan Pencapaian Renstra Dinas Sosial Sampai Dengan Tahun 2020

Kode Rekening	Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun Berjalan (2016-2018)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia									
1.2.2.1	Program Penanggulangan Kemiskinan dan Permasalahan Kesejahteraan Sosial Masyarakat									
	Urusan Wajib									
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial									
1.1.1.15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Prosentase KFM Yang Meningkat Produktifitasnya Secara Sosial Ekonomi	17,34%	15,99%	16,20 %	16,20 %	100%	17%	49,19%	2,84
1.1.1.15.1	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya	Jumlah Pendamping yang ditingkatkan Kapasitasnya	0	783	89,00 Orang	89	100%	0	872	#DIV/0!
				260					260	#DIV/0!
				150					150	#DIV/0!
1.1.1.15.4	Pengadain sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin	Jumlah KFM yang menerima bantuan stimulan KUBE (Orang)	0	2649	178,00 Kelompok	178	100%	20	2847	#DIV/0!
1.1.1.15.7	Distribusi Raskin	Jumlah RTSM yang menerima Raskin	31	31	31,00 Kecamatan	31	100%	31	93	3
1.1.1.15.8	Penataan sasaran penerima bantuan Sosial	Jumlah Sasaran Penerima Bantuan Sosial	1.700	0	335,00 Orang	335	100%	280	615	0,36

Pada saat pra-wawancara yang peneliti lakukan kepada Bapak RN selaku Analis Pelayanan Sosial, yang peneliti lakukan, peneliti menemukan indikasi permasalahan yang ada pada penyelenggaraan program tersebut di Kabupaten Bandung. Berdasarkan evaluasi lapangan yang dilakukan Dinas Sosial di Kabupaten Bandung pada akhir tahun 2021, dari 24 KUBE yang tersebar di setiap kecamatan Kabupaten Bandung, terdapat 4 KUBE yang terhenti pengelolaan usahanya. Pengelolaan program KUBE masih belum efektif, dimana sebagian masyarakat yang ikut serta dalam program KUBE tidak bisa melaksanakan kegiatan secara berkelanjutan.

Berdasarkan pada uraian latar belakang, pada penelitian ini peneliti tertarik untuk mengevaluasi program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kabupaten Bandung untuk melihat bagaimana realisasi program tersebut berjalan. Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul **“Evaluasi Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Bandung”**

B. Identifikasi Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti telah mengidentifikasi beberapa persoalan yang merupakan masalah pada penelitian ini diantaranya:

1. Kenaikan angka kemiskinan Kabupaten Bandung dari tahun 2019-2020 yang semula 6.65% - 6.91% menjadi kendala bagi peningkatan kesejahteraan penduduk Kabupaten Bandung.
2. Pelaksanaan program KUBE yang belum sepenuhnya efektif, dikarenakan terdapat beberapa kelompok KUBE di Kabupaten Bandung yang usahanya terhenti.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan beberapa identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini ialah:

1. Bagaimana Efektivitas program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam rangka pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bandung?
2. Bagaimana Efisiensi program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam rangka pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bandung?

3. Bagaimana Kecukupan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam rangka pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bandung?
4. Bagaimana Kesamaan atau Perataan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam rangka pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bandung?
5. Bagaimana Responsivitas program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam rangka pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bandung?
6. Bagaimana Ketepatan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam rangka pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bandung?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini ialah untuk:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana Efektivitas program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bandung
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana Efisiensi program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bandung
3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana Kecukupan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bandung
4. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana Perataan atau Kesamaan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bandung

5. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana Responsivitas program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bandung
6. Untuk mengetahui bagaimana Ketepatan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bandung

E. Manfaat Hasil Penelitian

Melalui penelitian ini, peneliti berharap akan adanya manfaat yang didapatkan baik dari segi teoritis maupun praktisnya. Adapun manfaat tersebut berupa:

1. Secara Teoretis

Pada penelitian ini hasilnya diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan yang lebih spesifik mengenai kajian ilmu administrasi publik, khususnya dalam pengimplementasian teori yang berkenaan dengan pembahasan pada penelitian ini seperti kebijakan publik dan evaluasi kebijakan

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian tentang program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi pemerintah Kabupaten Bandung dalam meningkatkan efektivitas program KUBE agar dapat berpengaruh besar terhadap penekanan angka kemiskinan di Kabupaten Bandung.

- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan data dan informasi serta menambah ilmu pengetahuan dalam hal pengevaluasian program KUBE untuk meningkatkan efektivitas pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bandung khususnya kepada peneliti.

F. Kerangka Pemikiran

(Dunn, 2003) menyamakan istilah “evaluasi” dengan interpretasi, penilaian secara angka dan kata-kata sebagai upaya untuk mengkaji hasil dari suatu kebijakan berdasarkan satuan nilainya. Lebih khusus lagi, evaluasi berkaitan dengan membuat suatu informasi tentang nilai atau manfaat dari hasil kebijakan. Apabila hasil dari kebijakan tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang ada, maka kebijakan atau program dapat dikatakan telah mencapai tujuan dan sasarannya. Dengan demikian, kebijakan atau program tersebut telah membuahkan tingkat efektivitas yang signifikan, yang artinya masalah-masalah kebijakan telah mampu diselesaikan.

Terdapat enam kriteria yang digunakan dalam mengevaluasi suatu program menurut (Dunn, 2003) yang terdiri dari:

1. Efektivitas mengacu pada apakah suatu alternatif mencapai hasil (efek) yang diinginkan atau meraih tujuan dari diambilnya tindakan.
2. Efisiensi mengacu pada jumlah usaha yang diperlukan untuk membuahkan tingkat efektivitas tertentu.
3. Kecukupan mengacu pada sejauh mana kesesuaian tingkat kinerja dengan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menyebabkan adanya masalah.
4. Kesamaan atau pemerataan berhubungan dengan pendistribusian manfaat dari suatu program secara adil

5. Responsivitas berhubungan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu.
6. Ketepatan berkenaan dengan nilai atau substansi dari tujuan program dan kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut.

Gambar 1. 2 Kerangka Pemikiran

